

Tahun 2026
TRIWULAN I



LAPORAN KINERJA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kijawanan

LEMBAR PENGESAHAN



(REVISI) LAPORAN KINERJA (LKj)

TRIWULAN I TAHUN 2026 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Cirebon, 15 April 2026

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan

Disusun oleh:

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum



Yusuf Fathanah

Udin Casrudin

KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2025 – 2029, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2026, namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di Tahun 2029.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan realisasi atau capaian pada salah satu IKU.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan I Tahun 2026.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. SDM PPN Kejawanan
- 1.6. Sistematika Penyajian

2. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap
- 2.2. Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2026
- 2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

3. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

4. PENUTUP

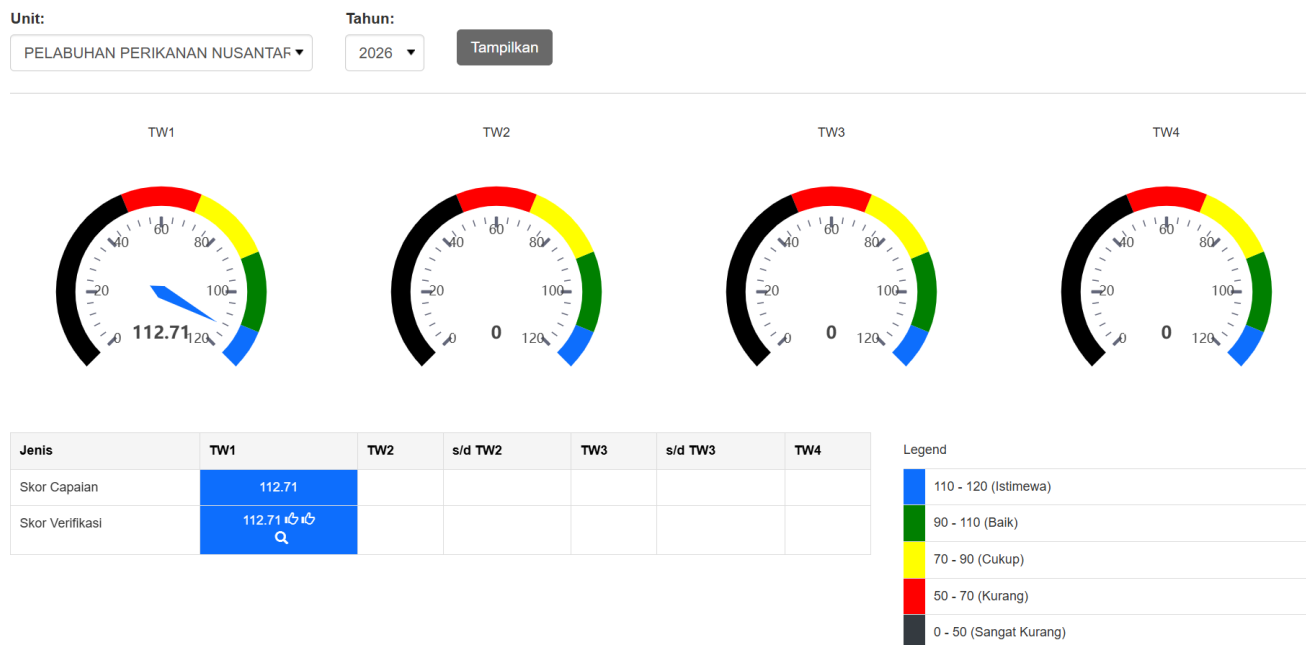
- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja TA 2026
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja TA 2026
- Rencana Aksi Tahun 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp87.066.009.000,- yang terealisasi sebesar Rp6.274.824.435,- atau 7,21% dari total pagu Tahun 2026. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 112,71%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1).



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh nilai capaian Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai angka 100% atau lebih yaitu sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut:

1. IK1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Rp. Juta)
2. IK2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)
3. IK4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
4. IK7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
5. IK8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
6. IK11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)

7. IK14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
8. IK18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sementara untuk 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, belum terdapat capaian/realisasi pada aplikasi kinerjaku, adapun indikator tersebut yaitu:

9. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
10. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
11. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
13. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
14. IK12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
15. IK13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
16. IK15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
17. IK16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*).

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

1.2. Gambaran Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

PPN KEJAWANAN
NGLADENIPPN KEJAWANAN
NGLADENIPPN KEJAWANAN
NGLADENIPPN KEJAWANAN
NGLADENIPPN KEJAWANAN
NGLADENIPPN KEJAWANAN
NGLADENI

- PPN KEJAWANAN
-
- NGLADENI

9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Subbagian Umum, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

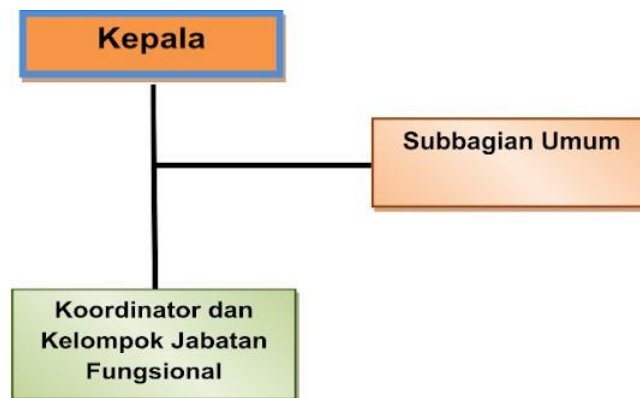
2. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha bertanggungjawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti

sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha;

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN (Mahir), Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama), Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Mahir), Pranata Humas (Pertama), Penata Perizinan, Arsiparis, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) serta Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T).

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Gambar 3. Struktur Organisasi PPN Kejawanan

1.5. SDM PPN KEJAWANAN

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di dukung oleh 76 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 48 orang, PPPK sebanyak 28 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	-	1	1
	- Dukungan Manajerial	-	-	2	-	2
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	5	4	-	9
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya)	-	-	-	1	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	2	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	8	-	8
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	2	-	2
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	5	-	5
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	4	-	-	4
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama)	-	-	1	-	1
	- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	-	-	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	9	-	9
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	2	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	6	-	-	6
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Operator Layanan Operasional	-	4	-	-	4
	- Pengadministrasi Perkantoran	-	4	-	-	4
Jumlah		-	28	45	3	76

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Pelabuhan	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Dukungan Manajerial	-	-	1	-	1	-	-	2
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	8	-	-	9
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	2	-	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	7	-	1	-	-	8
6.	Jabatan Fungsional Tertentu								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	1	4	-	-	-	-	5
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	1	-	3	-	-	4
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	9	-	-	-	-	9
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	2	-	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	6	-	-	6
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Operator Layanan Operasional	-	-	-	-	4	-	-	4
	- Pengadministrasi Perkantoran	-	-	-	-	4	-	-	4
Jumlah		-	3	40	4	29	-	-	76

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1.	Kepala Pelabuhan	1	1	-
2.	Kepala Subbagian Umum	1	1	-
	- Dukungan Manajerial	2	2	-
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	9	9	-
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya)	1	1	-
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	3	3	-
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama)	1	1	-
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	8	8	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	2	1	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	5	4	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	1	1	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	4	4	-
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	2	1	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	1	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	1	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama)	1	-	1
	- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	9	6	3
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	2	2	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	6	5	1
	- Arsiparis Ahli Pertama	1	1	-
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	-
	- Operator Layanan Operasional	4	4	-
	- Pengadministrasi Perkantoran	4	4	-
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		76	60	16
Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		100,00	78,95	21,05

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2026 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:



1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2025.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab

kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap

- Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Visi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan dan Mensejahterakan Nelayan”** untuk mewujudkan **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.
- Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.
- Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:
 1. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan;
 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan;
 3. Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan;
 4. Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing;
 5. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

VISI DAN MISI PPN KEJAWANAN

“Terwujudnya Pusat Usaha Perikanan Yang Berdaya Saing dan Terintegrasi Bertaraf Internasional”

Sebagai “Pusat Usaha Perikanan” artinya bahwa wilayah PPN Kejawanan merupakan pusat bagi kegiatan perikanan dari hulu (perikanan tangkap) sampai hilir (pengolahan dan pemasaran ikan).

“Yang Berdaya Saing” artinya produk perikanan di PPN Kejawanan mempunyai mutu yang dapat bersaing pada pasar domestik, dan internasional.

“Dan Terintegrasi” artinya seluruh aktivitas usaha perikanan saling terkait dan mendukung (mewujudkan KKP mini) termasuk aktivitas pendukung non perikanan untuk mengoptimalkan potensi PPN Kejawanan.

“Bertaraf Internasional” artinya seluruh aktivitas dan usaha di PPN Kejawanan memiliki standar Internasional.

2.2. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang diturunkan dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	6.587,86
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	5.550
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	95
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	33
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	847
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	77
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	82
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	71,75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88,8

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk Tahun 2026 dapat dikomposisikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2026

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT		PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		72.729.495.000	1.844.267.028	2,54
		BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	3.499.531.000	1.371.474.431	39,19
		RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I (Unit)	69.229.964.000	472.792.597	0,68
2.	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		14.336.514.000	4.430.557.407	30,90
		CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	7.500.000	-	-
		EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	13.589.014.000	4.401.452.407	32,39
		EBB.951	Layanan Sarana Internal (Unit)	100.000.000	-	-
		EBB.971	Layanan Prasarana Internal (Unit)	640.000.000	29.105.000	4,55

2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini :

Tabel 6. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026

Matriks Capaian Triwulan I
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TAHUN 2026												Keterangan
								Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
								Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1	Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Operasional Wisata Bahari Kejawanan (2338.BGA.002.054.H) Peningkatan pelayanan pengadaan Listrik (2338.BGA.002.054.I) Peningkatan pelayanan pengadaan air bersih (2338.BGA.002.054.J) Expo Kelautan dan Perikanan (2338.BGA.002.054.L) Publikasi dan Promosi Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.M) Penatausahaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.T) Pemeliharaan Jaringan Air Kotor (2342.EBA.994.002.I) Pemeliharaan Irigasi (2342.EBA.994.002.J)	195.700.000,00 93.252.000,00 157.297.000,00 50.000.000,00 29.400.000,00 32.380.000,00 22.207.000,00 44.414.000,00	6.587,86	Rp. Juta	1.900,00 2.502,61 131,72%												Tercapai
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan di PPN Kejawanan (2338.BGA.002.054.E) Kegiatan Pendampingan dan Movev Pendataan Pelaksanaan PNB Pasca Produksi (2338.BGA.002.057.D)	354.671.000,00 52.234.000,00	5.550	Ton	900 1.159,97 128,89%												Tercapai
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Kepatuhan usaha dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.A) Layanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.B)	20.700.000,00 67.260.000,00	100	Persen													Belum ada capaian
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Monev PIPP dalam rangka mendukung PNB Pasca dan PIT (2338.BGA.002.057.A)	50.040.000,00	88	Nilai	88 90,75 103,13%												Tercapai

[illegible]

		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional (2338.RBQ.003.053)	69.296.130.000,00	33	Persen											Belum ada capaian
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan (SELARASKAN) (2338.BGA.002.054.C)	88.000.000,00	33,00	Nilai	33,00	87,49	265,12%								Tercapai
					Pengadaan Tenaga Kebersihan Kawasan Pelabuhan (2338.BGA.002.054.D)	1.407.814.000,00													
					Gerakan Penghijauan Lingkungan Kawasan Pelabuhan Bersama Stakeholder (2338.BGA.002.054.F)	30.600.000,00													
					Gerakan Bersih Pantai di PPN Kejawanan dalam rangka mendukung Pogram Laut Sebasah (2338.BGA.002.054.G)	19.100.000,00													
					Survailance dan Resertifikat ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 serta Penyiapan Dokumen Integrasi (SMM,SML dan SMP) dalam rangka mendukung PNBPA Pasca Produksi (2338.BGA.002.054.K)	22.985.000,00													
					Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas (2338.BGA.002.054.Q)	120.260.000,00													
					Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055.A)	206.830.000,00													
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Pemeriksaan kelaikan kapal perikanan	-	847	Kapal	797	801	100,50%								Tercapai
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Sosialisasi Penerbitan Buku Pelaut Perikanan dalam rangka mendukung PNBPA Pasca Produksi (2338.BGA.002.051.E)	9.780.000,00	0,28	Nilai											Belum ada capaian
					Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dalam rangka mendukung PNBPA Pasca Produksi (2338.BGA.002.051.F)	19.560.000,00													

5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Pemenuhan Dokumen ZI	-	75,50	Nilai											Belum ada capaian	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	86	Persen	86	100	116,28%							Tercapai		
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)		Pemenuhan dokumen kinerja	-	88,2	Nilai											Belum ada capaian	
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)		Peningkatan Pelayanan Publik (2338.BGA.002.054.P)	186.550.000,00	84,5	Indeks											Belum ada capaian	
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342.CAN.955.051)	7.500.000,00	77	Persen	77	100	129,87%							Tercapai		
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin (2342.EBA.994.002.B)	197.690.000,00														
					Pengadaan Jasa Penyedia Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan	1.220.213.000,00														
					Pengadaan Jasa Lainnya orang per orang (2342.EBA.994.002.K)	385.280.000,00														
					Pengadaan sarana perkantoran (2342.EBB.951.051)	100.000.000,00														
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Kegiatan Penatausahaan BMN dalam rangka mendukung PNBP (2338.BGA.002.054.R)	40.785.000,00	82	Persen											Belum ada capaian	
					Penatausahaan Arsip dalam rangka mendukung PNBP (2338.BGA.002.054.S)	28.950.000,00														
					Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (2342.EBA.994.002.C)	350.405.000,00														
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan (2342.EBA.994.002.G)	247.331.000,00														
					Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran (2342.EBB.971.051)	640.000.000,00														

16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Gaji dan Tunjangan (2342.EBA.994.001)	9.771.608.000,00	92,1	Nilai														Belum ada capaian
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor (2342.EBA.994.002.A)	255.779.000,00																
		Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telekomunikasi, Air dan Lainnya (2342.EBA.994.002.D)	1.085.047.000,00																
		Terlaksananya Penyampaian Surat - Surat dan Dokumen Dinas (2342.EBA.994.002.E)	5.040.000,00																
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Perencanaan dan Penganggaran	-	71,75	Nilai														Belum ada capaian
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Forum Konsultasi Publik (Reviu SOP, Standar pelayanan) (2338.BGA.002.054.O)	8.780.000,00	88,8	Nilai	88,8	91,68	103,24%											Tercapai

Cirebon, 15 April 2026
Mengetahui,



MUSUF FATHANAH
Kepala PPN Kejawanan

BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2026 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut :

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s.d Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET Th 2026	TARGET TW I Th 2026	REALISASI TW I Th 2026	% CAPAIAN
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Juta Rupiah	6.587,86	1.900	2.502,61	131,72
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	5.550	900	1.159,97	128,89
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	100	-	-	-
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	88	88	90,75	103,13
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	95	-	-	-
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	33	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET Th 2026	TARGET TW I Th 2026	REALISASI TW I Th 2026	% CAPAIAN
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	33	33	87,49	265,12
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	847	797	801	100,50
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Nilai	0,28	-	-	-
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	75,5	-	-	-
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	86	86	100	116,28
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	88,2	-	-	-
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	84,5	-	-	-
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	77	77	100	129,87
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara	Persen	82	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET Th 2026	TARGET TW I Th 2026	REALISASI TW I Th 2026	% CAPAIAN
		Kejawanan (Persen)					
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	92,1	-	-	-
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	71,75	-	-	-
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	88,8	88,8	91,68	103,24

Adapun pembahasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

3. 1. 1. Sasaran Kegiatan 1 - Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)

Indikator Penerimaan PNBP merupakan indikator penerimaan negara bukan pajak pada PPN Kejawanan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBP yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA dan non SDA. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Kejawanan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh s.d Triwulan I Tahun 2026. Capaiannya berupa nilai realisasi nilai PNBP fungsional dan umum sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 (kumulatif).

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja “Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan” Triwulan I Tahun 2026

SK 1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan									
IK 1	Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
1.019,10	814,95	2.320,51	2.932,18	2.267,1	6.587,86	1.900	2.502,61	131,72	-	-

a. Target dan Realisasi

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, Nilai PNBPN di PPN Kejawan tercapai sebesar Rp2.502,61 juta atau persentase capaiannya sebesar 131,72% dari target Triwulan I Tahun 2026.

Capaian tersebut diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Kios Nelayan, Aula, serta penggunaan alat transportasi. Nilai PNBPN tertinggi pada pelayanan Wisata Bahari sebesar Rp747.330.000,- atau sebesar 29,86% dari total PNBPN pada Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 9. Rincian Nilai PNBPNon SDA di PPN Kejawan Triwulan I Tahun 2026

NO.	Bulan	Nilai Penerimaan PNBPNon SDA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Juta Rupiah)
1.	Januari	1.039.782.282
2.	Februari	736.531.057
3.	Maret	726.293.323
Total		2.502.606.662

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 37,52% - 10,30%. Peningkatan PNBPN pada triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelayanan tambat labuh dan meningkatnya pengunjung Wisata Bahari Kejawan.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanen dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanen			PPN Pekalongan		
Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)	Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)
6.587,86	2.502,61	37,98	794,11	138,17	17,40

Capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA” bila dibandingkan dengan PPN Pekalongan, capaian di PPN Kejawanen lebih besar dengan realisasi Rp2.502.606.662,-.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian Nilai PNBP di PPN Kejawanen sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan serta Tambat Labuh dan Floating Repair.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian PNBP di PPN Kejawanen adalah perubahan cuaca dan tren penangkapan. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pencapaian PNBP khususnya untuk pelayanan tambat labuh, floating repair dan kebersihan kolam.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawanen” Tahun 2026 yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki serta meningkatkan fasilitas layanan di PPN Kejawanen.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanen” Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanen Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP di PPN Kejawanen	37,99%	624.650.000	163.407.853	237.293.345	73.885.492

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROI) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	11,83%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{98,20\%}{20} \times 50 \right)$	79,57%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp163.407.853,00 atau 26,16% dari total anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi 11,83% dan nilai efisiensi sebesar 79,57%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 1 – Nilai PNBP di PPN Kejawan, didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang SDM. Dengan pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP ada 13 (tiga belas) pelayanan. Terdapat SDM yang merangkap dalam pelaksanaan pelayanan jasa. Petugas pas masuk harian ada 7 (tujuh) orang, yang bertugas dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Untuk petugas pelayanan jasa air 1 (satu) orang dan listrik 1 (satu) orang, petugas pemanfaatan sewa BMN 2 (dua) orang, petugas pelayanan penggunaan kendaraan 1 (dua) orang, petugas pelayanan jasa tambat labuh 1 (satu) orang, petugas pas harian wisata 9 (sembilan) orang, petugas pelayanan penggunaan halaman wisata bahari 1 (satu) orang, Petugas pengolahan air limbah 1 (satu) orang, Petugas pelayanan penggunaan ruang pertemuan 1 (satu) orang, Petugas penggunaan kawasan 1 (satu) orang.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawan” yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi kegiatan:

- Operasional Wisata Bahari Kejawan
- Peningkatan pelayanan pengadaan Listrik
- Peningkatan pelayanan pengadaan air bersih
- Expo Kelautan dan Perikanan
- Publikasi dan Promosi Pelabuhan Perikanan
- Penatausahaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan
- Pemeliharaan Jaringan Air Kotor
- Pemeliharaan Irigasi

3. 1. 2. Sasaran Kegiatan 2 - Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan meningkat

IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)

Indikator Kinerja Utama “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” merupakan hasil perhitungan dari jumlah volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan selama triwulan pada tahun berjalan. Realisasi capaian IKU ini dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Capaian s/d triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 1.159,97 Ton atau sebesar 122,1% dari total target Tahun triwulan I 2026 sebesar 950 ton.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Triwulan I Tahun 2026

SK 2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan meningkat										
IK 2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan										
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
993,09	541	528,52	879,92	1.355,68	5.550	950	1.159,97	122,125	6.190.000	0,000187

a. Target dan Realisasi

Dari target triwulan I tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar 950 ton, jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Kejawan sampai dengan triwulan I Tahun 2026 tercapai sebesar 1.159,97 ton atau persentase capaiannya 122,125%. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Kejawan setiap bulannya sebagai berikut :

Tabel 13. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026

NO.	Bulan	Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawan (Ton)
1.	Januari	327,45
2.	Februari	389,59
3.	Maret	442,92
Total		1.159,97

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel volume produksi di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut: Realisasi volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawan setiap tahunnya mengalami pergerakan yang cenderung fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kapal domisili yang mengalami perubahan fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, trend penangkapan ikan yang berubah-ubah setiap tahunnya, durasi penangkapan ikan yang berubah, perubahan iklim yang semakin tidak menentu, dll. Faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah trip suatu kapal ketika beroperasi melakukan penangkapan ikan di *fishing ground*. Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, volume produksi juga mengalami perubahan yang sifatnya fluktuatif.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I, diperoleh angka perbandingan sebesar 0,000187%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Volume produksi perikanan tangkap s.d Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawan			PPN Pekalongan		
Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
5.550	1.159,97	20,90	9.648	1.460	15,13

Jika dibandingkan dengan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Pekalongan, capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawan sedikit lebih kecil dengan selisih 300 ton. Hal ini dapat dimaklumi mengingat PPN Pekalongan memiliki jumlah kapal domisili yang jauh lebih banyak

dibandingkan dengan PPN Kejawan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan aktivitas pendaratan ikan serta volume produksi yang besar pula.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Meskipun target volume produksi perikanan tangkap pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai dan bahkan melampaui dari target yang telah ditentukan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kapal domisili yang fluktuatif, trend musim ikan yang semakin tidak terkirakan, trend pelayaran yang semakin panjang, fluktuasi harga BBM, dan faktor alam/cuaca serta faktor faktor tidak terduga lainnya. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik, PPN Kejawan melakukan beberapa inovasi diantaranya melaksanakan pencatatan produksi secara digital, efisien dan transparan melalui aplikasi bantu pencatatan. PPN Kejawan juga memaksimalkan pemanfaatan timbangan digital yang turut membantu kinerja petugas di lapangan.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu hambatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak bisa dihindari seperti alam dan cuaca, trend penangkapan yang semakin lama karena semakin sulit mendapatkan ikan, musim ikan yang semakin tidak terprediksi, dll.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki seperti timbangan digital, fasilitas penunjang kegiatan pembongkaran ikan (palet timbangan, selasar portabel, dll) aplikasi bantu pencatatan pendaratan ikan, sumber daya manusia, perawatan sarana dan prasarana, dll.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 15. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Volume produksi perikanan tangkap	20,90%	406.905.000	72.282.518	85.044.611	12.762.093

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROI) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	3,14%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{34,88\%}{20} \times 50 \right)$	57,84%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp72.282.518,00 atau 17,76% dari total anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi 3,14% dan nilai efisiensi sebesar 57,84%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Kejawanen, didukung oleh 2 (lima) orang petugas pendataan produksi ikan dan 5 (dua) orang validator produksi. Kegiatan pendaratan ikan di PPN Kejawanen relatif cepat dan kondusif sehingga tidak ada kegiatan pendaratan ikan yang menghabiskan waktu sampai 24 jam/sampai diberlakukan sistem *shift* pegawai. Meskipun pada praktiknya, hal ini sangat kurang dengan volume serta intensitas aktivitas pendaratan ikan yang ada. Diharapkan persoalan SDM dapat dilakukan penambahan petugas enumerator agar kegiatan pencatatan pendaratan ikan dapat berlangsung normal.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pelabuhan perikanan yang meliputi kegiatan:

- Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan di PPN Kejawanen
- Kegiatan Pendampingan dan Monev Pendataan Pelaksanaan PNBK Pasca Produksi

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu koordinasi dengan instansi terkait perihal validasi data statistik perikanan tangkap.

- Memastikan sarana dan prasarana pendukung seperti timbangan digital, palet, selasar, dll berfungsi secara optimal.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait proses pendataan volume produksi ikan oleh petugas.

3. 1. 3. Sasaran Kegiatan 3 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab

IKU 3 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang dalam prosesnya diperlukan analisa atau evaluasi permohonan perusahaan.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja "Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan" Triwulan I Tahun 2026

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab								
IK 3		Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	-	-	-	100	-	-	-	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2021 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, IKU tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
100	-	-	100	-	-

Capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, tidak lepas dari komitmen dan kerja keras PPN Kejawanan, khususnya Petugas Pelayanan Pemanfaatan sewa BMN dalam memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan. Peran serta dari pengguna jasa yang kooperatif dalam menyampaikan kelengkapan berkas permohonan juga menjadi faktor penunjang keberhasilan sehingga proses analisis menjadi lebih cepat.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 18. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kepatuhan usaha	-	87.960.000	3.818.900	-	- 3.818.900

dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROi) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-4,34%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,28\%}{20} \times 50 \right)$				39,15%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp3.818.900,00 atau 4,34% dari total anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi -4,34% dan nilai efisiensi sebesar 39,15%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, didukung oleh 1 (satu) orang petugas Petugas Pelayanan Pemanfaatan Sewa BMN yang merangkap jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Mengacu pada analisis keberhasilan atau kegagalan, beberapa program / kegiatan dapat menjadi solusi dan berdampak terhadap peningkatan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Permohonan yang dianalisis dan atau evaluasi yaitu:

- Kepatuhan usahan dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan;
- Layanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan.

IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai dengan keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan melalui aplikasi PIPP. Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data Operasional Pelabuhan dengan indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis data yang harus diinput melalui aplikasi PIPP.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab											
IK 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan											
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT		
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra	
88,25	85,33	89,58	88,67	96,33	88	88	90,75	103,13	-	-	

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat kinerja pelabuhan Triwulan I Tahun 2026 yaitu 90,75 atau 103,125% dari target Tahun 2026.

Tabel 20. Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2026

NO.	Bulan	Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan (EVKIN)
1.	Januari	88,75
2.	Februari	90,25
3.	Maret	93,25
Triwulan I Tahun 2026		90,75

Tabel 21. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Januari Tahun 2026

TAHUN ANGGARAN YANG DI EVALUASI			TAHUN 2026											
BULAN YANG DI EVALUASI			Des	Nov	Okt	Sep	Agst	Juli	Juni	Mei	Apr	Mrt	Feb	Jan
NO	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali												19,00
2	E-Logbook	Ya/Tidak												Ya
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak												Ya
4	SHTI	Ya/Tidak												Tidak
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%												254,43
6	Pendapatan Pelabuhan	%												100,00
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan												Lengkap
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT												1.795,00
9	Panjang Dermaga	m												848,00
10	Kedalaman Kolam	cm												300,00
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada												Ada
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan												Lengkap
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha												19,02
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT												306,00
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari												10,28
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit												43,00
17	STBLKK	%												11,76
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan												8,00
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan												10,00
20	Pelaksanaan KS	Hasil												Baik
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%												100,00
22	Penyaluran Es (kapal)	%												100,00
23	Penyaluran BBM (kapal)	%												100,00
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit												11,00
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%												735,30
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan												3023,74
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan												2 (75)
Jumlah														90,5
Kesimpulan dan Rekomendasi														SANGAT BAIK

Tabel 22. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Februari Tahun 2026

T+523+A3:035+A3:036+523+A3:035+A3:035			TAHUN 2026											
BULAN YANG DI EVALUASI			Des	Nov	Okt	Sep	Agst	Juli	Juni	Mei	Apr	Mnt	Feb	Jan
NO	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali											16,00	19,00
2	E-Logbook	Ya/Tidak											Ya	Ya
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak											Ya	Ya
4	SHTI	Ya/Tidak											Ya	Ya
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%											68,06	56,74
6	Pendapatan Pelabuhan	%											100,00	100,00
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan											Lengkap	Lengkap
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT											1478,00	1795,00
9	Panjang Dermaga	m											848,00	848,00
10	Kedalaman Kolam	cm											300,00	300,00
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada											Ada	Ada
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan											Lengkap	Lengkap
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha											27,92	27,92
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT											190,00	306,00
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari											14,22	10,28
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit											20,00	43,00
17	STBLKK	%											196,88	11,76
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan											6,00	8,00
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan											6,00	10,00
20	Pelaksanaan KS	Hasil											Baik	Baik
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%											100,00	100,00
22	Penyaluran Es (kapal)	%											100,00	100,00
23	Penyaluran BBM (kapal)	%											90,65	100,00
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit											11,00	11,00
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%											34,91	34,91
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan											3097,57	3138,74
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan											2 {77}	2 {75}
Jumlah													90,25	88,75
Kesimpulan dan Rekomendasi													SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

Tabel 23. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Maret Tahun 2026

TAHUN ANGGARAN YANG DI EVALUASI			TAHUN 2026											
BULAN YANG DI EVALUASI			Des	Nov	Okt	Sep	Agst	Juli	Juni	Mei	Apr	Mrt	Feb	Jan
NO	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali										16,00	16,00	19,00
2	E-Logbook	Ya/Tidak										Ya	Ya	Ya
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak										Ya	Ya	Ya
4	SHTI	Ya/Tidak										Ya	Ya	Ya
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%										424,04	68,06	56,74
6	Pendapatan Pelabuhan	%										100,00	100,00	100,00
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan										Lengkap	Lengkap	Lengkap
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT										2397,00	1478,00	1795,00
9	Panjang Dermaga	m										848,00	848,00	848,00
10	Kedalaman Kolam	cm										300,00	300,00	300,00
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak/Ada										Ada	Ada	Ada
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan										Lengkap	Lengkap	Lengkap
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha										27,92	27,92	27,92
14	Pelayanan Tambak Labuh	GT										463,00	190,00	306,00
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari										14,29	14,22	10,28
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit										41,00	20,00	43,00
17	STBUK	%										79,55	196,88	11,76
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan										6,00	6,00	8,00
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantina Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan										5,00	6,00	10,00
20	Pelaksanaan K5	Hasil										Baik	Baik	Baik
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%										100,00	100,00	100,00
22	Penyaluran Es (kapal)	%										100,00	100,00	100,00
23	Penyaluran BBM (kapal)	%										100,00	90,65	100,00
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit										11,00	11,00	11,00
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%										34,91	34,91	34,91
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan										3105,44	3097,57	3138,74
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan										1 {78}	2 {77}	2 {75}
Jumlah												93,25	90,25	88,75
Kesimpulan dan Rekomendasi												SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 cenderung mengalami periode yang fluktuatif. sempat mengalami tren positif di tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya pada periode yang sama meskipun penurunan yang terjadi tidak signifikan, selanjutnya selalu mengalami tren positif. Realisasi terhadap capaian indikator kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2026. Kondisi demikian dapat diakibatkan oleh banyak faktor mengingat evaluasi kinerja dipengaruhi oleh 27 kriteria penilaian, seperti aktivitas kedatangan dan keberangkatan kapal yang setiap tahun mengalami pasang surut, volume produksi harian, dll.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Tidak terdapat IKU tersebut dalam renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88	90,75	103,13	85	95,13	111,92

Capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan” di PPN Kejawanan tercatat sebesar 90,75 atau 103,125% dari target sebesar 88. jika dibandingkan, capaian tersebut lebih rendah dari PPN Pekalongan yakni sebesar 95,13 atau 111,92% dari target 88 pada periode yang sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah frekuensi kunjungan kapal serta volume produksi yang menjadi penyumbang terbesar dalam perhitungan pemenuhan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2026, indikator kinerja tingkat operasional pelabuhan telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Penilaian evaluasi kinerja sangat tergantung dari kegiatan operasional yang telah dilaksanakan serta keaktifan operator PIPP dalam memasukkan data operasional, baik secara harian maupun bulanan melalui aplikasi PIPP. Keberhasilan atau kegagalan penilaian evaluasi kinerja terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kriteria yang merupakan kegiatan operasional Pelabuhan di PPN Kejawanan, yaitu :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-Logbook
3. Aplikasi SPB Online
4. SHTI
5. Realisasi Penyerapan Anggaran
6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (Docking, Bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan

14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan
16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLKK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (Kapal dan Industri Pengolahan)
22. Penyaluran Es (kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan Tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Tercapainya target juga didukung oleh adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok yang melakukan tugasnya, terpeliharanya manfaat fasilitas fungsional dan pokok Pelabuhan perikanan, tersedianya kualifikasi SDM pegawai yang sesuai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan pada Pelabuhan perikanan, dan semakin tumbuh dan berkembangnya stakeholder dalam tata niaga perikanan, serta keaktifan operator PIPP.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain beberapa kriteria bergantung pada aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan, seperti volume produksi, STBLKK, frekuensi kunjungan kapal, dan tambat labuh dimana kriteria-kriteria tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti faktor cuaca/alam serta trend dan musim penangkapan ikan, jumlah kapal domisili, dll.

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen dan kesadaran masing-masing petugas dalam hal pemenuhan kriteria evaluasi kinerja.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu melakukan penambahan sumber daya manusia agar proses pemenuhan kriteria tidak hanya bergantung pada satu/dua individu, sehingga proses pemenuhan kriteria pada evaluasi kinerja bisa efektif dan efisien.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 25. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Operasional Pelabuhan	103,13%	114.196.000	730.000	117.764.625	117.034.625
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				102,49%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,59\%}{20} \times 50 \right)$				306,21%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp730.000,00 atau 0,64% dari total anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi 102,49% dan nilai efisiensi sebesar 306,21%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Operasional PPN Kejawan adalah petugas/penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing kelompok serta operator PIPP yang merangkap sebagai pengelola data dan jabatan fungsional AP3T dan P3T.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Operasional Pelabuhan yaitu:

- Monev PIPP dalam rangka mendukung PNB Pasca dan PIT;
- Implementasi PIPP dalam rangka mendukung PNB Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);
- Inspeksi Pengendalian Mutu Ikan Pembongkaran Ikan di pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung PNB Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan terukur (PIT);

- Sertifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan (SKPI) dalam rangka mendukung PNBP Pasca Produksi. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Tingkat Operasional Pelabuhan” yaitu sosialisasi serta pembinaan ke pelabuhan binaan meliputi pembinaan kesyahbandaran, pembinaan serta koordinasi terkait pengelolaan dan operasional PIPP, serta mengikuti kegiatan pelatihan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan input PIPP baik diselenggarakan oleh internal maupun Dit. KP.

IKU 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Pelabuhan Perikanan merupakan sarana yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang operasional kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Salah satu fungsi pemerintahannya yaitu menyelenggarakan pelayanan bidang Kesyahbandaran, yang spesifik melayani kapal - kapal perikanan yang beroperasi di pelabuhan perikanan.

PPN Kejawanan, sebagai salah satu pelabuhan perikanan kelas Nusantara, turut melaksanakan tugas dan fungsi Kesyahbandaran sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Pada peraturan tersebut disebutkan setidaknya terdapat 18 tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Namun, pada perhitungan indikator kinerja ini, hanya 3 pelayanan Kesyahbandaran yang dijadikan indikator, yang dianggap sebagai pelayanan yang utama dan paling sering dilaksanakan, antara lain Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar, Pelayanan Penerbitan STBLKK, dan Pelayanan Penerbitan SHTI (Lembar Awal).

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab										
IK 5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	-	-	95	-	-	-	79	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2021 hingga Tahun 2023 belum terdapat indikator kinerja tersebut. Sementara sejak Tahun 2024 dan Tahun 2025, IKU tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
95	-	-	62	-	-

Capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU terkait Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran sudah dilaksanakan terutama yang terkait langsung dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penarikan PNBK Pasca Produksi.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 28. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelayanan Kesyahbandaran	-	142.447.000	17.601.000	-	- 17.601.000
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-12,36%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \right)$ $= 50\% + \left(\frac{16,55\%}{20} \times 50 \right)$				19,11%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp17.601.000,00 atau 12,36% dari total anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi -12,36% dan nilai efisiensi sebesar 19,11%.

2. Sumber Daya Manusia

Realisasi capaian indikator ini ditunjang oleh sumber daya manusia Kesyahbandaran yang kompeten dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima. Sumber daya manusia yang tersedia di PPN Kejawanan guna menunjang capaian indikator kinerja ini antara lain; 6 (enam) orang Syahbandar Pelabuhan Perikanan, 5 (lima) orang calon Syahbandar dan 8 (delapan) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Operasional Kesyahbandaran di wilayah Binaan dalam rangka mendukung PNPB Pasca produksi dan Penangkapan Ikan, Sosialisasi Tertib Bandar dalam rangka penanganan Kebakaran, Keselamatan dan Keamanan Kapal di Pelabuhan Perikanan, Implementasi

Kebijakan Bidang Kapal Perikanan dalam mendukung PIT, Kegiatan Kesyahbandaran di PPN Kejawan dan Binaan dalam rangka mendukung Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta Kegiatan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di PP.

IKU 6 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan" Triwulan I Tahun 2026

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan yang optimal dan bertanggung jawab									
IK 6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	-	-	-	33	-	-	-	6,1	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2021 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan. Sementara di Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, IKU tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target target dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2026 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanen			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
33	-	-	80	-	-

Capaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen”. Peningkatan fasilitas untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur dilakukan melalui kegiatan pembangunan prasarana Pelabuhan perikanan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 31. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional	-	69.296.130.000	472.792.597	-	- 472.792.597

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROI) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	-0,68%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{29,20\%}{20} \times 50 \right)$	48,29%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp472.792.597,00 atau 0,68% dari total anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi -0,68% dan nilai efisiensi sebesar 48,29%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan adalah KPA, PPK, Pokja ULP dan Tim Teknis PTP yang semuanya dengan jabatan fungsional, sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah sangat efisien.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja tersebut adalah PPN Kejawanan telah memiliki dokumen pendukung rencana pengembangan Kawasan berupa: Masterplan, AMDAL, AMDAL LALIN, KKRL, KKKPRL dan Dukungan pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon) untuk pengembangan kawasan Pelabuhan perikanan.

IKU 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang dioperasikan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan diukur berdasarkan skor pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan

di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di *update* berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 3										
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab										
IK 7										
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	-	95,55	88,60	33	33	87,49	265,12	-	-

a. Target dan Realisasi

Pengukuran capaian kinerja Indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 87,49 atau 265,12% dari target Triwulan I Tahun 2026.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Perbandingan dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mengalami penurunan dari sebesar 1,11 poin. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian pengisian aplikasi SELARASKAN sehingga ada beberapa kendala dalam proses penginputan.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
33	87,49	265,12	33	74,54	225,87

Capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” dibandingkan dengan UPT Pelabuhan Perikanan Pusat terdekat, yaitu PPN Pekalongan, nilai PPN Kejawanan berada diatas PPN Pekalongan yaitu sebesar 87,49 sedangkan PPN Pekalongan memperoleh nilai sebesar 74,54.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian iku ini dilaksanakan melalui mekanisme penginputan pelaksanaan program dan kegiatan tata kelola lingkungan ke dalam aplikasi SELARASKAN yang merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan di cantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Nilai pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan didukung dengan telah terlaksananya program pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan sehingga memudahkan dalam penginputan dikarenakan sebagian besar program pada aplikasi telah dilaksanakan di PPN Kejawanan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	265,12%	1.895.589.000	1.114.285.360	5.025.608.534	3.911.323.174
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				206,34%	

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{\frac{RO}{20}} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{193,51\%}{20} \times 50 \right)$	565,50%
--	---------

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp1.114.285.360,00 atau 58,78% dari total anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi 206,34% dan nilai efisiensi sebesar 565,85%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah tim yang terdiri dari Kepala Pelabuhan sebagai penasihat, wakil manajemen lingkungan, pengawasan dan pengendalian, analisa dan pencegahan dampak, rehabilitasi dan pemulihan dampak, pengendali dokumen dan 6 (enam) orang pelaksana sesuai dengan surat penugasan dari Kepala PPN Kejawanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan (SELARASKAN)
2. Pengadaan Tenaga Kebersihan Kawasan Pelabuhan
3. Gerakan Penghijauan Lingkungan Kawasan Pelabuhan Bersama Stakeholder
4. Gerakan Bersih Pantai di PPN Kejawanan dalam rangka mendukung Program Laut Sebasah
5. Surveillance dan Resertifikat ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 serta Penyiapan Dokumen Integrasi (SMM,SML dan SMP) dalam rangka mendukung PNBK Pasca Produksi
6. Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas
7. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan

3. 1. 4. Sasaran Kegiatan 4 - Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Salah satu tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan, utamanya terkait tupoksi kesyahbandaran, PPN Kejawanan bertanggung jawab untuk memastikan setiap kapal perikanan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis,

terutama pada aspek kelaikan kapal perikanan. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama, penerbitan dokumen kapal perikanan, dalam hal ini Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang pegawai yang telah dikukuhkan menjadi Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri KP No. 33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Triwulan I Tahun 2026

SK 4		Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	-	256	556	847	797	801	100,50	-	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa produktivitas penerbitan dokumen kapal, khususnya SKKP di PPN Kejawanan, sangat tinggi. Hal ini, tak lepas dari komitmen PPN Kejawanan dalam mengakomodasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku usaha perikanan tangkap. Selain itu, cakupan wilayah kerja yang luas, yakni kapal - kapal perikanan yang berdomisili di wilayah Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes sampai wilayah Tegal, Jawa Tengah, menjadikan PPN Kejawanan sebagai sentra pelayanan penerbitan SKKP. Apabila dilakukan *breakdown* terhadap data akumulatif pada tabel di atas, maka penerbitan SKKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Perhitungan Akumulatif Untuk Realisasi IKU Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2026

NO.	Bulan	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
Tahun 2023 - 2025		767
1.	Januari	20
2.	Februari	3
3.	Maret	11
s.d Triwulan I Tahun 2026		801

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Dapat dilihat dari tabel diatas apabila dibandingkan dengan periode yang sama (triwulan I) pada tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan terkait jumlah sertifikat yang telah diterbitkan yaitu sebanyak 33,33%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kapal yang melakukan migrasi perizinan ke pusat, meskipun kapal berlokasi di pelabuhan - pelabuhan binaan. Selain itu adanya kapal yang masih memiliki sertifikat yang masih berlaku sehingga belum memerlukan perpanjangan sertifikat.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Tidak terdapat IKU tersebut dalam renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
847	801	94,57	586	619	105,63

Jika dibandingkan jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan izin daerah yang diterbitkan dengan PPN Pekalongan, jumlah sertifikat yang telah diterbitkan di PPN Kejawanan lebih tinggi yaitu 129,40%. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh target PPN Kejawanan yang juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan PPN Pekalongan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya kapal perikanan izin daerah yang berada di PPN Kejawanan dan juga pelabuhan pelabuhan binaan, sementara di PPN Pekalongan dan pelabuhan binaan lebih banyak kapal dengan izin pusat.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian IKU ini dilaksanakan melalui kegiatan mekanisme reguler (melalui pemeriksaan kelaikan kapal perikanan) berdasarkan permohonan dari pengguna jasa. Pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sepenuhnya dilaksanakan di aplikasi SICEFI melalui tautan www.kapal.kkp.go.id. Khusus untuk kapal izin daerah, disposisi penugasan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dilakukan oleh Koordinator, yang dalam hal ini adalah Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, dan proses verifikasi hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta penandatanganan SKKP dilakukan di PPN Kejawanan oleh

PPKKP dan Kepala PPN Kejawanan. Sebanyak 34 dokumen SKKP untuk kapal perikanan izin daerah telah diterbitkan selama periode Triwulan I 2026, jumlah ini mengalami penurunan 33,33% dari SKKP yang terbit pada Triwulan I tahun 2025 yang berjumlah 51 dokumen.

Analisa Kuantitatif :

Capaian IKU ini dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini :

Target (T) = 797 (dokumen) (penjumlahan antara capaian 2023 s.d 2025 dengan target Triwulan I 2026)

Capaian (C) = 801 (dokumen) (penjumlahan antara capaian 2023 s.d 2025 dengan capaian Triwulan I 2026)

$$\begin{aligned}\text{presentase} &= C/T \times 100\% \\ &= 801/797 \times 100\% \\ &= 100,50\%\end{aligned}$$

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pemeriksaan kelaikan kapal perikanan	133,39%	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$				-	

$= 50\% + \left(\frac{276,25\%}{20} \times 50 \right)$	
---	--

Pada Tahun 2026, tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, didukung oleh 10 (sepuluh) orang petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal perikanan yang juga merangkap sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, merangkap jabatan fungsional sebagai Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T), sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien. Namun, di sisi lain, pemanfaatan SDM ini juga menjadi bahan evaluasi tersendiri karena berpotensi pelaksanaan tugas menjadi tidak fokus yang mungkin dapat menghambat proses pelayanan penerbitan SKKP.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor Penghambat :

Meskipun capaian telah melampaui target IKU, hal - hal yang mempengaruhi antara lain :

1. Banyaknya kapal izin daerah (di pelabuhan binaan) yang melakukan migrasi perizinan ke izin pusat, sehingga terhitung sebagai penerbitan SKKP untuk kapal izin pusat dan permohonan penerbitan SKKP tersebut tidak melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah penerbitan SKKP yang telah diterbitkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan I tahun 2026 sebanyak 33,33% dibandingkan jumlah penerbitan SKKP pada Triwulan I tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan penerbitan SKKP pada Triwulan IV tahun 2025, SKKP yang telah terbit pada Triwulan I tahun 2026 juga mengalami penurunan sebanyak 48,48%.
2. Kurangnya dukungan anggaran imbas dari efisiensi dalam pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan sangat berpengaruh terhadap mobilitas dan produktivitas Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) dalam menerbitkan SKKP pada Triwulan I 2026. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah binaan PPN Kejawanan selama ini permohonan SKKP sepanjang Pantai Utara Jawa dari Kabupaten Brebes sampai dengan wilayah PP. Ciparage di Kabupaten Karawang.
3. Adanya wilayah PP Binaan yang jauh dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Syahbandar yang ditempatkan wilayah tersebut belum mengikuti diklat sebagai Petuga Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKP), sehingga perlu adanya Diklat Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan lagi untuk optimalisasi dan efisiensi.

Faktor Pendukung :

Terpenuhinya target IKU didukung oleh beberapa hal di bawah ini :

1. Permohonan dan penerbitan SKKP melalui aplikasi SICEFI yang memudahkan pemohon dalam mengajukan perpanjangan SKKP dimana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerbitan SKKP sehingga pemohon tidak perlu menghabiskan waktu dalam perjalanan ke kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
2. Adanya beberapa petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang juga menjabat sebagai Syahbandar di PP binaan, sehingga kapal yang berada di wilayah kerja tersebut lebih mudah dan cepat dilakukan pemeriksaan.

IKU 9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha sub sektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi persyaratan laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan.

Khusus untuk elemen personel, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayaran, perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan merupakan hal penting dan krusial dalam operasional kapal perikanan. Komitmen terhadap penegakan HAM Perikanan menjadi perhatian tersendiri bagi PPN Kejawanan. Melalui penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan aspek perlindungan awak kapal perikanan dapat lebih terjamin. Adapun kompetensi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan, keamanan dan keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, serta keamanan pangan dan jaminan mutu ikan hasil tangkapan.

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:

- Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
- Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
- Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
- Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 6		Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 9		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT		
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra	
n/a	n/a	n/a	n/a	-	0,28	-	-	-	-	-	

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2021 hingga Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan, sementara pada Tahun 2025 pengukuran IKU tersebut bersifat semester.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
0,28	-	-	0,28	-	-

Capaian indikator kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 41. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal	-	29.340.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$				-	

$= 50\% + \left(\frac{45,31\%}{20} \times 50 \right)$	
--	--

Belum terdapat realisasi anggaran yang mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menunjang terlaksananya indikator Peningkatan Pengetahuan, Kompetensi, dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan di PPN Kejawanan antara lain; 6 (enam) orang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 5 (lima) orang calon Syahbandar dan 8 (delapan) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor penghambat :

1. Lemahnya penegakan peraturan di pelabuhan perikanan, tidak hanya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, namun juga di seluruh Pelabuhan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial kultural ekonomi awak kapal perikanan yang menyebabkan keengganan untuk memiliki sertifikat.
2. Kebutuhan SDM awak kapal yang tinggi menyebabkan *traffic* permintaan awak kapal yang tidak sebanding dengan SDM awak kapal yang telah tersertifikasi. Sementara itu, kapal perikanan tidak bisa menunggu untuk terpenuhinya SDM awak kapal yang tersertifikasi untuk dapat berangkat melaut sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menentukan kebijakan yang bersifat *win win solution*.
3. Pemilik kapal perikanan yang tidak terlalu mementingkan sertifikasi, namun kemampuan bekerja awak kapal yang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, menyebabkan awak kapal enggan untuk memiliki sertifikat kompetensi.
4. Terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Bekerja Bagi Awak Kapal Perikanan Pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia, yang masih memberikan penangguhan waktu kepada awak kapal perikanan untuk memenuhi persyaratan untuk memiliki sertifikat sesuai jabatan pada kapal perikanan, memiliki Buku Pelaut Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut serta Surat Keterangan Sehat.

Faktor Pendukung :

Meskipun banyak dari awak kapal perikanan yang belum memiliki sertifikat kompetensi maupun

profisiensi, namun Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan tetap berusaha menegakkan aspek perlindungan awak kapal perikanan melalui pengesahan Perjanjian Kerja Laut yang berdasarkan salah satunya dari kepesertaan awak kapal perikanan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Terbukti dari seluruh awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, seluruhnya telah terdaftar asuransi nelayan dan memiliki dokumen PKL. Bahkan sejak bulan Juni 2025, Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah mulai memiliki Buku Pelaut Perikanan dan memiliki Surat Keterangan Sehat. Hal ini dapat terlaksana antara lain dikarenakan faktor - faktor sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, khususnya Syahbandar di PPN Kejawanan yang berwenang dalam hal keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dalam mendukung perlindungan HAM perikanan, salah satunya melalui pemeriksaan dan pengesahan PKL.
2. Kesadaran yang mulai tumbuh dari sisi pelaku usaha dan awak kapal perikanan akan pentingnya perlindungan bagi awak kapal selama bekerja di atas kapal. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang intensif dari PPN Kejawanan kepada masyarakat pemangku kepentingan.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 - Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKM 10 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kejawanan” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Internal PPN Kejawanan yang ditunjuk oleh Kepala PPN Kejawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- b. Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c. Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d. Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e. Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f. Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT		
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	75,5	-	-	-	80	-	

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan I Tahun 2026 belum ada dikarenakan belum dilaksanakan dan rencana Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas PPN Kejawanan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
75,5	-	-	75,5	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan dan kegagalan dokumen WBK ditentukan oleh pemenuhan dokumen pendukung WBK yang dihitung dari perbandingan jumlah dokumen WBK yang dipenuhi terhadap dokumen pendukung WBK yang dipersyaratkan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pemenuhan Dokumen ZI	-	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,54\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Pada Tahun 2026 tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang melaksanakan tugas terlaksananya capaian indikator kinerja ini masuk dalam Tim WBK berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala Pelabuhan. Jumlah SDM sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang yang terdiri dari Kepala Pelabuhan (Penanggungjawab), Ketua, Sekretaris, serta Koordinator dan Anggota Pokja per masing-masing area. Penggunaan SDM sudah efisien karena semua pegawai yang melaksanakan tugas pemenuhan dokumen WBK melakukan rangkap pekerjaan diluar tupoksi. Selain itu, pengumpulan dokumen ZI WBK dilakukan melalui link *google drive* sehingga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dokumen yang harus dipenuhi.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen Pelaksanaan rencana aksi melalui pemenuhan dokumen persyaratan dalam pelaksanaan Zona Integritas.

IKM 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan" Triwulan I Tahun 2026

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	100	100	100	86	86	100	116,28	85	117,65

a. Target dan Realisasi

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I 2026 adalah 100% atau 116,28% dari target Tahun 2026, dimana periode Oktober - Desember Tahun 2025 rekomendasi kepada PPN Kejawanan telah tuntas (100%) ditindaklanjuti.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada tahun 2021-2022, tidak terdapat IKM terkait Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru pada Tahun 2023. Realisasi pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 mencapai 100%.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka persentase realisasi IKM tersebut mencapai 117,65%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
86	100	116,28	86	100	116,28

Jika dibandingkan dengan capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di PPN Pekalongan, persentase capaiannya sama dengan PPN Kejawanan sebesar 100%.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan rekapitulasi rekomendasi terhadap laporan hasil pengawasan periode Oktober - Desember Tahun 2025 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekomendasi kepada PPN Kejawanan telah tuntas (100%) ditindaklanjuti sehingga IKU persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Kejawanan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100%.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 47. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	116,28%	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{39,33\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Pada Tahun 2026 tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” pada Triwulan IV Tahun 2025, didukung oleh tim pengelolaan keuangan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan untuk tercapainya IKM tersebut adalah pemenuhan dokumen dalam rangka tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

IKM 12 - Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP.

Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 12		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
-	-	n/a	n/a	-	88,2	-	-	-	88	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
Pada tahun 2020, 2023 dan 2024, tidak terdapat IKM terkait Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2021, 2022 dan 2025, IKM tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88,2	-	-	88,2	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Hambatan yang dihadapi adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk periode selanjutnya.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 50. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pemenuhan dokumen kinerja	-	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{R0}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{6,55\%}{20} \times 50 \right)$	-
--	---

Pada Tahun 2026 tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2026, SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota dengan rincian Kepala Subbagian Umum dan perwakilan dari masing-masing tim kerja.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” yaitu pemenuhan dokumen kinerja organisasi.

IKM 13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	84,5	-	-	-	84	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM IP ASN periode pelaporannya bersifat semesteran.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
84,5	-	-	84,5	-	-

Capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, hambatan yang dihadapi yaitu pegawai yang mengikuti bimtek dan sosialisasi belum secara aktif melaporkan hasil kegiatan bimtek/diklat/sosialisasi yang diikuti ke

bagian kepegawaian. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah reminder kepada seluruh pegawai terkait info pendaftaran bimtek/diklat/sosialisasi serta pengumpulan sertifikat bimtek/diklat/sosialisasi dan mengunggah data dukung pada aplikasi MyASN BKN.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Manajemen SDM	-	186.550.000	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{14,18\%}{20} \times 50 \right)$				50,00%	

Belum terdapat realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 76 (tujuh puluh enam) orang ASN. Agar capaian IP ASN maksimal, masing – masing pegawai telah diarahkan mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan jenis jabatan memenuhi kriteria penilaian dimensi kompetensi selain itu diadakan beberapa kali kegiatan pembinaan pegawai dan monitoring bulanan SKP pegawai untuk menjaga nilai kinerja serta tingkat kedisiplinan pegawai.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Tahun 2025 yaitu monitoring dan evaluasi kinerja serta penerapan disiplin pegawai. Selain itu, pegawai dihimbau untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Seminar/Workshop secara luring maupun daring.

IKM 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ unit kerja. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	100	77	77	100	129,87	76	131,58

a. Target dan Realisasi

Capaian IKM Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 adalah 100% atau 129,87% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2021 hingga Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Pada Triwulan I Tahun 2025 memiliki capaian yang sama dengan capaian Triwulan I Tahun 2026.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka persentase realisasi IKM tersebut mencapai 131,58%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
77	100	129,87	77	100	129,87

Capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan memiliki capaian yang sama sebesar 100%.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan. Selain itu, jika dimungkinkan melakukan upaya percepatan pengadaan jasa melalui penyedia serta dilakukan pemantauan dan percepatan PBJ.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 56. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	129,87%	1.910.683.000	1.319.338.037	2.481.406.494	1.162.068.457
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				60,82%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{16,18\%}{20} \times 50 \right)$				202,05%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp1.319.338.037,00 atau 69,05% dari alokasi anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi 60,82% dan nilai efisiensi sebesar 202,05%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola PBJ.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara e-purchasing.

IKM 15 - Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Tabel 57. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan											
IK 15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan											
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT		
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	82	-	-	-	81	-	

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Pada Tahun 2021-2025, IKM tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
82	-	-	82	-	-

Perbandingan dengan satker lain belum dapat dilakukan karena pengukuran bersifat tahunan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Belum terdapat pengukuran terkait pengelolaan BMN.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 59. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengelolaan BMN	-	1.307.471.000	65.202.196	-	- 65.202.196
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-4,99%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{13,05\%}{20} \times 50 \right)$				37,53%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp65.202.196,00 atau 4,99% dari alokasi anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi -4,99% dan nilai efisiensi sebesar 37,53%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 1 (satu) orang Pengelola BMN.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yang menunjang untuk tercapainya IKM tersebut yaitu:

- Kegiatan Penatausahaan BMN dalam rangka mendukung PNBPN;
- Penatausahaan Arsip dalam rangka mendukung PNBPN;
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan;
- Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran.

IKU 16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Tabel 60. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 16		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	92,1	-	-	-	92	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM Nilai IKPA periode pelaporannya bersifat semesteran.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2026 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
92,1	-	-	92,1	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan belum dapat dilakukan pengukuran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pengukuran dan pelaporan indikator kinerja ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi 13 (tiga belas) komponen yang terdapat pada monev PA pada aplikasi OM-SPAN. Keberhasilan

pencapaian target indikator kinerja ini berhubungan dengan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 62. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perkantoran	-	11.117.474.000	3.045.365.974	-	- 3.045.365.974
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-27,39%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$				-18,48%	

$= 50\% + \left(\frac{2,76\%}{20} \times 50 \right)$	
---	--

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp3.045.365.974,00 atau 27,39% dari alokasi anggaran Tahun 2026 dengan efisiensi -27,39% dan nilai efisiensi sebesar -18,48%.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, didukung 2 (dua) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

IKU 17 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKPA didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15
Efisiensi (25)		

Tabel 63. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan”
Triwulan I Tahun 2026

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	-	71,75	-	-	-	81,5	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2020 hingga triwulan III Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. IKM tersebut baru muncul pada triwulan IV Tahun 2024.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
71,75	-	-	71,75	-	-

Perbandingan dengan satker lain belum dapat dilakukan karena pengukuran bersifat tahunan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi.

Faktor penghambat pencapaian NKPA yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 65. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				-	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{5,26\%}{20} \times 50 \right)$				-	

Pada Tahun 2026 tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 66. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan I Tahun 2026

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen										
IK 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen										
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi 2026				Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I Th. 2026	Realisasi TW I Th. 2026	% Realisasi thd Target TW I Th. 2026	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	-	90,81	94,79	88,8	88,8	91,68	103,24%	88,5	103,59

a. Target dan Realisasi

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan I Tahun 2026 sebesar 91,68 atau 103,24% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada tahun 2021-2022, tidak terdapat IKM terkait Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru pada Triwulan IV Tahun 2023. Realisasi IKM tersebut mengalami peningkatan di tahun 2025, namun mengalami penurunan pada triwulan I tahun 2026.

c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka persentase realisasi IKM tersebut mencapai 103,59%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88,8	91,68	103,24	88,8	96,19	108,32

Jika dibandingkan dengan PPN Pekalongan, realisasi capaian Nilai SKM PPN Pekalongan lebih tinggi dengan selisih nilai sebesar 4,51.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pelaksanaan pelayanan didukung oleh komitmen petugas, penerapan standar layanan yang sudah berjalan, serta ketersediaan layanan utama yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Di sisi lain, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penataan sarana dan informasi layanan yang belum optimal, akses serta respon layanan konsultasi dan pengaduan yang perlu ditingkatkan, serta perlunya penyamaan pemahaman antar petugas agar informasi yang disampaikan lebih konsisten, seiring dengan meningkatnya ekspektasi pengguna jasa.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Forum Konsultasi Publik (Reviu SOP, Standar pelayanan)	103,24%	8.780.000	-	9.064.757	9.064.757
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				103,24%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{4,88\%}{20} \times 50 \right)$				308,11%	

Belum terdapat realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, namun memiliki efisiensi sebesar 103,24% dan nilai efisiensi sebesar 308,11%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 1 (satu) orang Pranata Komputer.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan yang dapat mendukung IKM tersebut yakni Forum Konsultasi Publik.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2026, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp87.066.009.000,00 yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 69. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2026

KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	72.729.495.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.336.514.000
TOTAL		Rp87.066.009.000,-

Dari pagu anggaran tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kegiatannya telah menargetkan sebesar Rp87.066.009.000,- dengan realisasi capaian anggaran sebesar Rp6.274.824.435,- atau 7,21% dari jumlah pagu Tahun 2026.

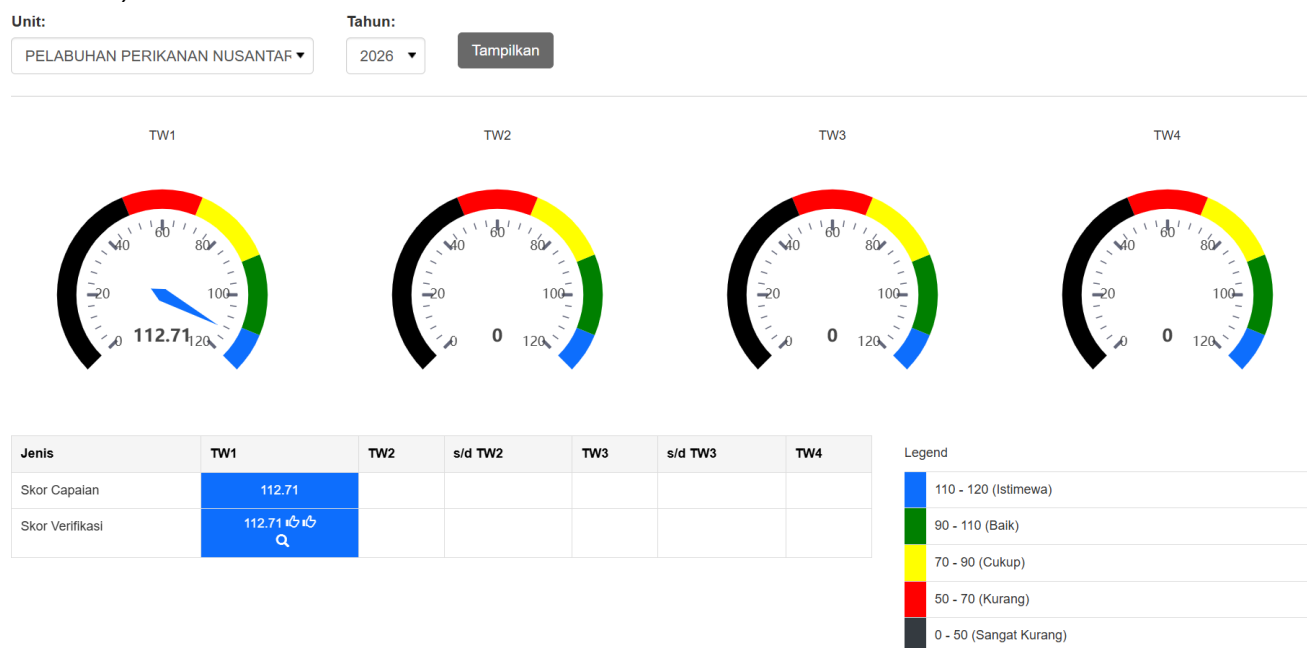
Tabel 70. Realisasi Keuangan PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2026

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	72.729.495.000	1.844.267.028	2,54
		BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	3.499.531.000	1.371.474.431	39,19
		RBQ.003 Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I (Unit)	69.229.964.000	472.792.597	0,68
2.	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.336.514.000	4.430.557.407	30,90
		CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	7.500.000	-	-
		EBA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	13.589.014.000	4.401.452.407	32,39
		EBB.951 Layanan Sarana Internal (Unit)	100.000.000	-	-
		EBB.971 Layanan Prasarana Internal (Unit)	640.000.000	29.105.000	4,55

BAB IV. PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp87.066.009.000,- yang terealisasi sebesar Rp6.274.824.435,- atau 7,21% dari total pagu Tahun 2026. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 112,71%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerja pada Gambar 1).



Gambar 4. Dashboard pada aplikasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh nilai capaian Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai angka 100% atau lebih yaitu sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut:

1. IK1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Rp. Juta)
2. IK2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)
3. IK4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
4. IK7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
5. IK8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

6. IK11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
7. IK14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
8. IK18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sementara untuk 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, belum terdapat capaian/realisasi pada aplikasi kinerjaku, adapun indikator tersebut yaitu:

9. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
10. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
11. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
13. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
14. IK12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
15. IK13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
16. IK15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
17. IK16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

4. 2. Saran

Dengan tercapainya semua target IKU dan IKM pada Triwulan I Tahun 2026 diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di triwulan berikutnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Kejawanan secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 masih belum sempurna. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu penyajian informasi standar produk pelayanan dan penyampaian penjelasan produk layanan kepada pengguna.

Semoga Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPN Kejawanan Triwulan I Tahun 2026 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Kejawanan di triwulan selanjutnya.